

Digital Repository Universitas Jember

-Modul Perkuliahan-

TEORI PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT
MULTIKULTURAL

Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A.

Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si



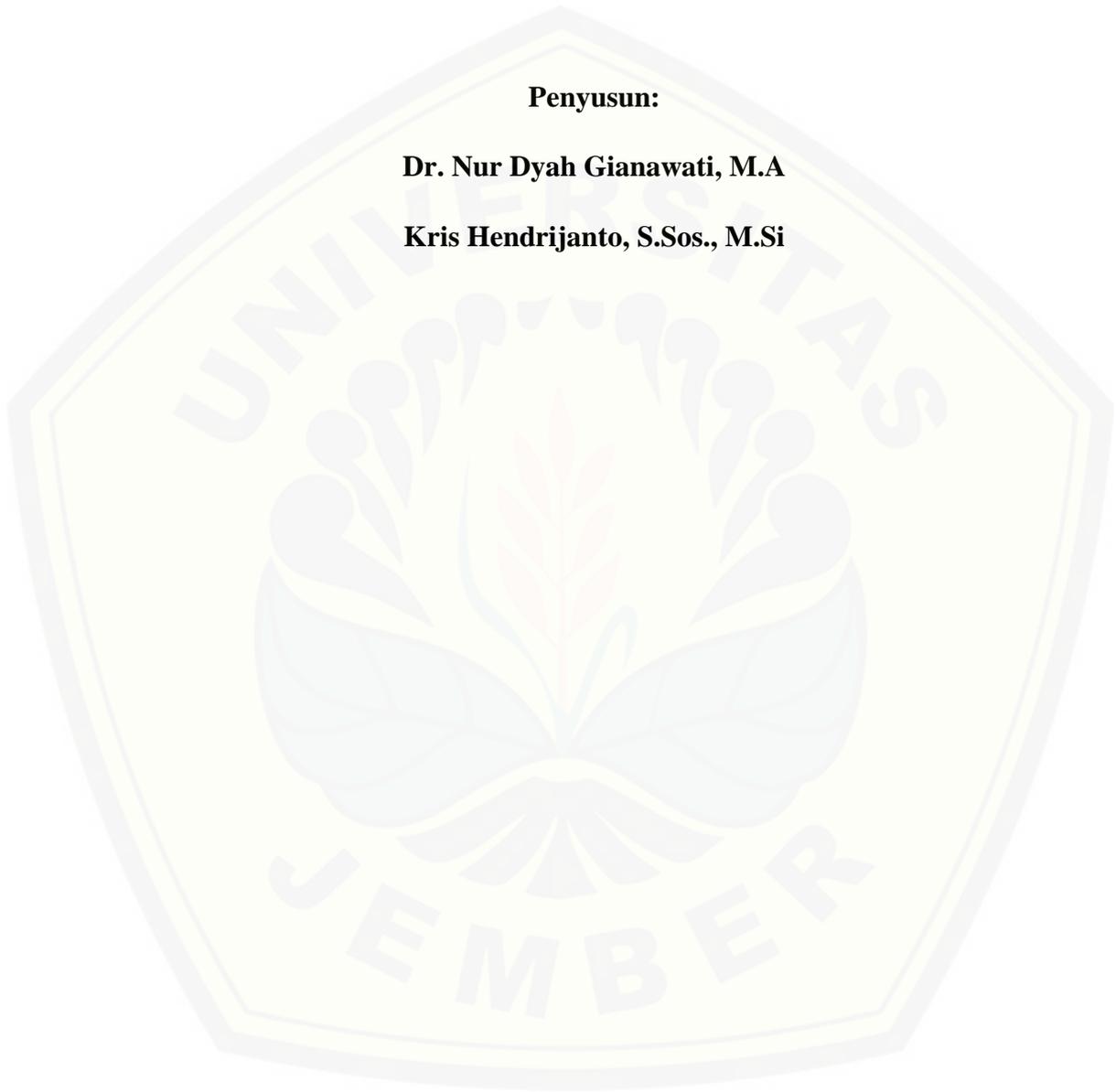
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

**MODUL PERKULIAHAN
MULTIKULTURALISME**

Penyusun:

Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A

Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si



**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

JUNI 2022

DAFTAR ISI

MODUL PERTAMA	
MULTIKULTURALISME	4
Apa itu Multikulturalisme	5
Masyarakat Multikultural	6
MODUL KEDUA	
KEBUDAYAAN DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS DIRI	8
Definisi Kebudayaan	8
Unsur-Unsur Kebudayaan	9
Keaneragaman Budaya dan Nilai-Nilai Bersama	11
Pengembangan Budaya	12
MODUL KETIGA	
BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MULTIKULTURAL	14
Apa itu Demokrasi	14
Demokrasi Sebagai Budaya Politik Masyarakat	
Multikultural Modern	14
Budaya Politik Masyarakat Demokratis	15
Sikap Hukum	16
Sikap <i>Reasonable</i>.....	16
Sikap Toleran dan <i>Overlapping Consensus</i>.....	17
MODUL KEEMPAT	
HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT	
MULTIKULTURAL	19
Hak Asasi Manusia dan Keaneragaman Manusia	19
Hak Asasi Manusia dalam Sejarah	20
Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Multikultural	20
MODUL KELIMA	
MEMAHAMI DAN MENYIKAPI PLURALITAS BUDAYA	25
Budaya sebagai <i>lifeworld</i>	25
Kebudayaan dan Agama	26
Loyalitas pada Kebudayaan dan Diversivitas Budaya	26
DAFTAR PUSTAKA	

MODUL PERTAMA

MULTIKULTURALISME

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep fenomena yang terkait dengan multikulturalisme. Materi perkuliahan ini meliputi multikulturalisme, kebudayaan dan pembentukan identitas diri, budaya politik masyarakat multikultural, hak asasi manusia dalam masyarakat multikultural, memahami dan menyikapi pluralitas budaya.

Globalisasi merupakan suatu proses saling ketergantungan tingkat global yang membuat dunia seolah-olah “menyempit” atau dengan pendekatan lain globalisasi merupakan suatu proses saling ketergantungan dan keterhubungan antar negara dan antar masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi, transportasi dan informasi/komunikasi. Globalisasi sebagai proses menjadi sangat nyata dalam kehidupan ekonomi. Globalisasi ekonomi membuat adanya pembagian kerja agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara efektif dan efisien, timbulnya kepemilikan pribadi yang dilindungi oleh hukum, yang akhirnya berkembang ke akumulasi kekayaan yang luar biasa dan menyebabkan kesenjangan ekonomi.

Timbulnya kecenderungan individual untuk bertindak atas dasar kepentingan dan manfaat pribadi sehingga semangat solidaritas berkurang. Berkaitan dengan itu maka globalisasi ekonomi telah mengubah sikap dan perilaku manusia modern. Sebelumnya harta merupakan sarana sekarang menjadi tujuan bahkan telah mejadi penjamin kehidupan.

Indonesia mengalami tantangan yang berat dilihat dari aspek kehidupan sosial-ekonomi, sosial-politik, sosial-budaya, sosial-religius, moralitas dan lingkungan hidup. Dari aspek sosial-ekonomi terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Terjadi akumulasi kekayaan kepada hanya sebagian kecil masyarakat, serta di lain pihak terjadi

akumulasi utang bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak peduli yang kaya atau yang miskin.

Aspek sosial-politik ada gejala yang menarik, bila terjadi pergantian kepemimpinan maka ada harapan baru, namun selang beberapa waktu maka terjadi kekecewaan dan kepercayaan makin berkurang. Ada kecenderungan kuat telah terjadi kolusi dan nepotisme tidak wajar, sehingga menimbulkan masalah korupsi yang parah. Aspek sosial-budaya ada gejala-gejala yang sangat memprihatinkan, umpamanya menggejalanya budaya kekerasan entah itu kekerasan sosial, bahkan kekerasan oleh negara.

Dari aspek sosial-religius, penghayatan agama seakar formalisme (mementingkan dan menekankan bentuk-bentuk lahir dari hidup keberagaman), ritualisme (sangat mementingkan bentuk-bentuk peribadatan), dan legalisme (ketaatan buta terhadap hukum-hukum agama secara hitam putih). Aspek moral dapat terlihat bahwa telah terjadi proses pengabaian dan pembunuhan suara hati atau hati nurani secara berkelanjutan. Dari aspek lingkungan-hidup, tampak bahwa telah terjadi kerusakan ekosistem yang sangat mengkhawatirkan, misalnya pada musim kemarau sebagian masyarakat sulit memperoleh air bersih, dan pada musim penghujan masyarakat mengalami banjir dan longsor.

Berikut merupakan tantangan yang ada di hadapan kita sebagai masyarakat Indonesia. masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multi etnis dan multi budaya. Hal ini bisa menjadi penghalang usaha menjawab tantangan tersebut jika kita menjadi picik dan tidak mau menerima kenyataan tersebut dan tidak berusaha untuk menghayatinya. Namun hal ini bisa mempermudah usaha menjawab tantangan tersebut karena kita memiliki begitu banyak *local wisdom*.

A. Apa Itu Multikulturalisme?

Menurut H.A.R. Tilaar, multikulturalisme adalah upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh resiko. Dwicipta mengatakan jangan mendefinisikan multikulturalisme

sebagai suatu doktrin politik dengan suatu doktrin politik dengan suatu kandungan program, maupun suatu aliran filsafat dengan suatu keketatan teori tentang ruang hidup manusia di dunia, melainkan sebagai suatu persepektif atau suatu cara pandang tentang kehidupan manusia.

Sementara Lawrence Blum menawarkan definisi sebagai multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggotanya sendiri.

Dari pemaparan definisi diatas dapat disimpulkan jika multikulturalisme di satu pihak merupakan suatu paham dan di lain pihak merupakan suatu pendekatan, yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat kita di dunia.

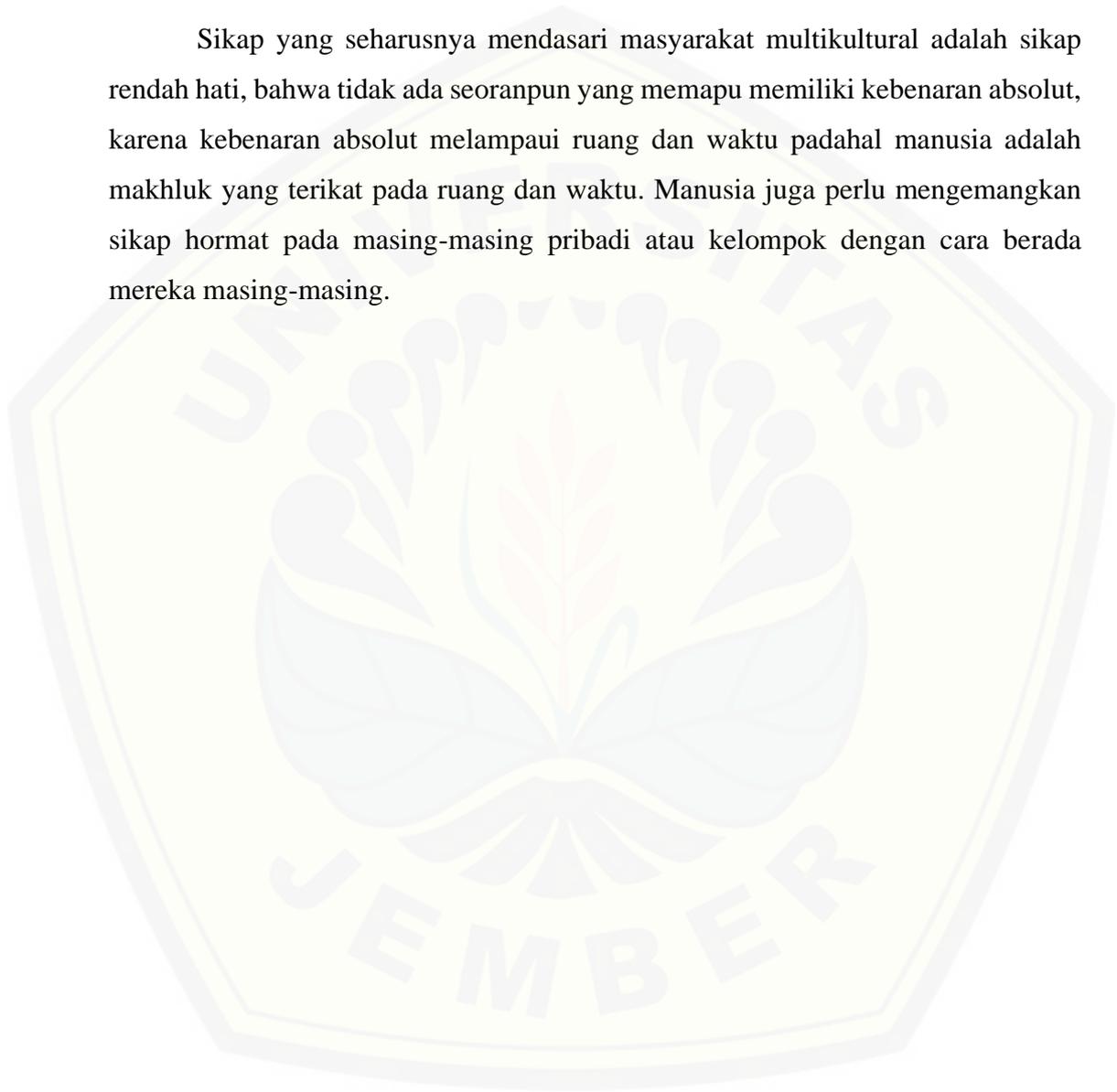
Perlu dipahami jika multikulturalisme bukan merupakan cara pandang yang menyamakan kebenaran-kebenaran lokal melainkan justru mencoba membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan yang ada sehingga tercipta perdamaian dan dengan demikian kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Jenis multikulturalisme ada lima yaitu multikulturalisme isolasionis, multikulturalisme akomodatif, multikulturalisme mandiri, multikulturalisme kritis atau interaktif dan multikulturalisme kosmopolitan.

B. Masyarakat Multikultural

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan budaya masing-masing, dengan dunia yang semakin terbuka ini maka perjumpaan dan pergaulan antar suku semakin mudah. Hal ini membuat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan bila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik, dan berpotensi menimbulkan kenyataan.

Sikap multikulturalisme merupakan sikap yang terbuka pada perbedaan. Mereka berkeyakinan perbedaan bila tidak dikelola dengan baik memang bisa menimbulkan konflik, namun bila kita mampu mengelolanya dengan baik maka perbedaan justru memperkaya dan bisa sangat produktif .

Sikap yang seharusnya mendasari masyarakat multikultural adalah sikap rendah hati, bahwa tidak ada seorangpun yang mampu memiliki kebenaran absolut, karena kebenaran absolut melampaui ruang dan waktu padahal manusia adalah makhluk yang terikat pada ruang dan waktu. Manusia juga perlu mengemangkan sikap hormat pada masing-masing pribadi atau kelompok dengan cara berada mereka masing-masing.



MODUL KEDUA

KEBUDAYAAN DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS DIRI

Multikulturalisme berhadapan dengan dua aspek yang harus mendapatkan perhatian seimbang. Aspek tersebut yaitu keaneragaman di satu pihak dan kesamaan di pihak lain. pembentukan identitas diri oleh kebudayaan tidak hanya menekankan aspek perbedaan melainkan juga kesamaan. Maka pada bagian kali ini akan membahas mengenai esensi kebudayaan dengan berbicara sekitar apa itu kebudayaan dan kebudayaan sebagai identitas diri, keragaman budaya dan nilai bersama.

A. Definisi Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari bahasa sangsekerta yaitu *buddhayah*, kata ini merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Secara etimologis kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal-budi. Bakker, 1984 menyatakan bahwa secara umum kebudayaan adalah sesuatu yang berharga atau baik yang belaku dalam masyarakat.

M.C. Schwartz dan D.K. Jordan merumuskan kebudayaan sebagai pola keyakinan dan ekspetasi yang dimiliki bersama oleh para anggota dan yang menjadi sumber norma-norma pemandu perilaku. Kebudayaan juga erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain.

Menurut Edward Burnett Tylor kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan jika bahwa kebudayaan adalah pengetahuan yang dimiliki manusia dalam proses untuk menginterpretasikan dunianya, sehingga manusia dapat menghasilkan tingkah laku tertentu.

B. Unsur-Unsur Kebudayaan

Unsur kebudayaan ada yang merupakan unsur-unsur dasar dan umum, unsur-unsur tersebut antara lain adalah bahasa, kepercayaan, pengetahuan, teknologi, nilai, norma dan sanksi, simbol, dan kesenian.

1. Bahasa

Bahasa adalah gudang kebudayaan, bahasa menjadi alat atau sarana utama untuk mengkomunikasikan, membahas, mensharekan dan mewariskan arti-arti kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Melalui bahasa manusia dapat menyusun kembali pengalaman masa lampau dan merencanakan masa depannya.

Bahasa bukan hanya sekedar sarana komunikasi bagi manusia, bahasa dapat membangun cara berpikir dan dengan menggunakan bahasa manusia menciptakan dirinya sendiri. Bahasa yang baik dan benar merupakan tuntutan bagi pengembangan ilmu dan teknologi modern. Bahasa juga bukan sekedar kata-kata yang digunakan manusia tetapi bahasa mempunyai aturan untuk membuat pernyataan, untuk mengajukan pertanyaan, untuk mengakui atau mengingkari dan lain sebagainya.

2. Kepercayaan

Kepercayaan berakaitan erat dengan pandangan manusia tentang bagaimana dunia ini beroperasi. Kepercayaan dapat timbul berdasarkan akal sehat, kebijaksanaan yang dimiliki suatu bangsa, agama, ilmu pengetahuan atau gabungan dari hal-hal tersebut. Kepercayaan mampu membentuk pengalaman seseorang baik secara pribadi maupun bersama atau kelompok. Untuk memperoleh kemajuan dan perubahan orang harus berjuang keras untuk mengalahkan tantangan. Kemajuan dan perubahan harus direbut, bukan dihadiahkan.

3. Norma dan Sanksi

Norma mempunyai sifat yang berbeda dengan nilai. Nilai sifatnya abstrak, maka norma sifatnya konkrit, berupa suatu aturan tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh manusia. Norma adalah tolak ukur yang ditetapkan sebagai pedoman bagi setiap aktivitas manusia. Norma setiap masyarakat tidak selalu harus sama, bahkan ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Dalam norma, ada yang disebut mores atau tata kelakuan, dan *folkways* atau kebiasaan.

Norma yang berlaku dalam masyarakat yang satu berbeda dengan norma dalam masyarakat yang lain. norma-norma yang berbeda itu juga berlaku dalam situasi dan setting yang berbeda pula. Norma sebagai garis pedoman, adapun kekuatan penggerakannya disebut sanksi. Sanksi adalah ganjaran atau hukuman yang memungkinkan seseorang mematuhi norma yang berlaku.

4. Kesenian

Kesenian termasuk kebudayaan material dalam kebudayaan. Setiap kebudayaan pasti mempunyai cara untuk berekspresi. Cara pengungkapan (ekspresi) nilai secara artistik ini disebut seni/kesenian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa setiap bentuk seni harus dikembangkan dalam kebudayaan. Manusia memiliki daya untuk mengagumi keindahan yang sangat kuat. Apa yang dikagumi berkaitan dengan keindahan diungkapkan melalui kesenian. Ada yang diungkapkan lewat lagu, gambar, puisi, atau taruan dan sebagainya.

5. Pengetahuan dan Teknologi

Pengetahuan dan teknologi dimiliki oleh suatu bangsa digunakan untuk membangun kebudayaan materialnya. Dengan teknologi manusia secara intensif berhubungan dengan alam. Dari pengalamannya ini manusia membangun kebudayaan. Dewasa ini kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh manusia, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan umat manusia

6. Nilai

Nilai itu sangat luas dan abstrak, nilai mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia atau masyarakat dianggap paling berharga. Timbulnya nilai berasal dari pandangan hidup suatu masyarakat. Ada standart kebenaran yang harus dimiliki oleh nilai, yakni sesuatu yang diinginkan semua orang dan layak dihormati.

Kendati demikian nilai inilah yang menentukan suasana kehidupan kebudayaan dan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap manusia atau masyarakat selalu memperjuangkan dan membela nilai-nilai terlebih nilai-nilai dasar yang sama.

7. Simbol

Simbol atau lambang adalah sesuatu yang mampu mengekspresikan sebuah makna terdalam dari suatu maksud. Banyak simbol yang merupakan objek fisik yang telah memperoleh makna kultural, dipergunakan untuk tujuan yang bersifat simbolik ketimbang tujuan instrumental. Menurut Ernest Cassier, dalam bertindak manusia sering menggunakan simbol karena manusia sering disebut sebagai makhluk yang menggunakan simbol-simbol.

Diantara alam dan dirinya, manusia menyisipkan sesuatu. Dengan sarana ini manusia mengambil jarak dengan alam sekaligus mendekatkan dirinya dengan alam. Dengan demikian manusia manusia mampu menelaah, mengerti dan menyatu kembali dengan alamannya. Sarana tersebut adalah mitos, bahasa, agama dan sebagainya yang oleh ernest disebut simbol atau lambang.

C. Keanekagaraman Budaya dan Nilai-Nilai Bersama

Keanekagaraman budaya selalu terdapat nilai-nilai bersama yang menjadi titik temu dalam membangun relasi sosial. Titik temu ini sudah dikemukakan dalam essentialisme budaya, bukan merupakan upaya untuk memaksa pola dan paradigma dari budaya tertentu agar menjadi satu nilai yang diterima secara universal, melainkan melihat apa yang sesungguhnya merupakan nilai yang dikejar tanpa apriori.

Menurut Sissela Bok ada tiga kategori nilai yang begitu fundamental bagi bertahan hidupnya kelompok yang harus ada bahkan dalam masyarakat yang paling kecil. Kategori pertama semua kelompok manusia dan semua tradisi religius moral dan hukum menekankan beberapa bentuk kewajiban positif menyangkut dukungan timbal balik, loyalitas dan hak untuk saling menghormati.

Kategori kedua dari nilai fundamental mencakup kewajiban-kewajiban negatif untuk menahan diri dari tindakan yang merusak dan merugikan. Kategori ketiga dari nilai dasar yang terkomposisi dalam semua masyarakat terdiri dari norma-norma untuk mendapatkan sekurang-kurangnya keadilan elementer dan keadilan prosedural dalam kasus-kasus konflik menyangkut perintah positif maupun negatif yang dikemukakan dalam dua kategori sebelumnya.

Ketiga kategori itu merupakan bentuk nilai minimalis yang merupakan kerangka dasar dari nilai-nilai dan ideal yang lebih abstrak dan kompleks seperti cinta, keberanian, menghargai hidup, kesetiaan, kebersamaan, integritas, tanggung jawab, keadilan. Karena itu abstraksi dari nilai minimalis ini sering dikontraskan dengan nilai maksimalis.

D. PENGEMBANGAN BUDAYA

Globalisasi budaya sama dengan globalisasi ekonomi. Budaya Universal berkembang disebarluskan. Media global yang disebarluaskan dan dijalankan sesuai kepentingan kapitalis transnasional, seperti televisi, musik, arsitektur, makanan, minuman, pakaian, film, sport dll.

Cara melestarikan budaya lokal adalah dengan cara menjadikan keunikan budaya lokal menjadi keunikan wilayahnya, keanekaragaman budaya dipertahankan dan dilestarikan serta memberikan identitas budaya dan rasa memiliki. Keanekaragaman budaya membantu memberikan rasa identitas dan komunitas, globalisasi dan komodifikasi budaya merupakan bagian sangat penting

Pengembangan budaya merupakan komponen penting dalam pendekatan pengembangan masyarakat. Kontek pengembangan masyarakat, pengembangan budaya memiliki 4 komponen yaitu melestarikan dan menghargai budaya lokal,

melestarikan dan menghargai budaya asli/pribumi, multikulturalisme dan budaya partisipatori.

Pembangunan budaya agar efektif dalam konteks pembangunan masyarakat yang lebih luas dengan cara warisa budaya harus tidak dipisahkan tetapi dilihat sebagai bagian yang nyata dari kehidupan masyarakat. Jika hal ini terlaksana, tradisi budaya lokal dapat menjadi point sentral untuk interaksi sosial, keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang luas.



MODUL KETIGA

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Salah satu aspek yang penting dalam menata kehidupan bersama masyarakat multikultural adalah budaya politik. Keaneragaman budaya dalam masyarakat multikultural juga merupakan kondisi yang menuntut adanya budaya politik yang sesuai. Sampai saat ini budaya politik yang sesuai dengan masyarakat multikultural adalah demokrasi.

A. Apa itu Demokrasi

Demokrasi dikembangkan oleh Aristoteles, menurut Aristoteles suatu bentuk negara dikatakan baik apabila diarahkan pada kepentingan umum, yakni kepentingan seluruh individu. Pemerintahan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat; secara langsung terdapat dalam demokrasi murni, dan secara perwakilan terdapat dalam demokrasi perwakilan.

Pemikiran modern mengenai demokrasi mengartikan sebagai ide politis filosofis tentang kedaulatan rakyat. Hal ini berarti semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subjek asli otoritas ini. Rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi negara secara bersama hanya pada tingkat yang sangat terbatas. Proses hukum yang harus ditungkan dalam undang-undang dasar memungkinkan rakyat dapat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu.

B. Demokrasi Sebagai Budaya Politik Masyarakat Multikultural Modern

Dalam masyarakat multikultural terdapat keanekaragaman budaya, suku, agama, keyakinan, nilai, cara berpikir, dengan segala kepentingannya masing-masing di belakangnya. Kepentingan tersebut tidak hanya berbeda namun juga dapat bertentangan satu sama lain. Keanekaragaman semacam itulah yang harus

diakomodasi dalam satu kondisi kehidupan bersama. Perbedaan bahkan pertentangan itu harus diramu dalam satu budaya politik yang mengkondisikan satu komunitas harmonis dan dinamis.

Fakta menunjukkan bahwa budaya politik demokrasi lepas dari kelemahan-kelemahannya masih merupakan budaya politik yang cukup relevan untuk menciptakan satu komunitas masyarakat multikultural. Namun yang perlu dipahami disini adalah sistem politik dalam paham demokrasi bukan yang terbaik dan tanpa kelemahan. Kelemahan yang ada ialah bahwa budaya demokrasi penuh dengan gejolak dan dinamika yang kadang-kadang justru sedikit banyak mengganggu stabilitas dalam masyarakat.

Namun terlepas itu, demokrasi tetap dianggap sebagai budaya politik yang paling memadai dalam masyarakat multikultural karena menghargai kebebasan dan kesetaraan. Kelemahan tersebut dapat dihindari kalau demokrasi dilakukan dalam *public reason* dan *public deliberation*. Dalam budaya politik demokrasi, bukan hanya kesepakatan yang dicari melainkan juga adanya pengakuan terhadap hal-hal yang tidak dapat disepakati menyangkut soal keyakinan dan nilai-nilai kelompok dan agama misalnya. Prinsip demokrasi adalah kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan mengandaikan keaneragaman dan kesetaraan mengendalikan kesamaan atau tidak adanya diskriminasi.

C. Budaya Politik Masyarakat Demokratis

Sudah dijelaskan diatas, budaya politik yang dianggap paling memadai bagi masyarakat multikultural hingga saat ini adalah demokrasi. Demokrasi yang dikehendaki ialah demokrasi liberal berbasis perwakilan dan lembaga-lembaga formal seperti partai, parlemen, pemerintahan, pemilu didampingi demokrasi deliberatif yang menuntut adanya pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dari rakyat sendiri yang menjadi subjek demokrasi.

Demokrasi deliberatif menekankan pada partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan juga kemitraan negara-masyarakat melalui pembukaan ruang publik bagi organisasi masyarakat sipil berhubungan dengan negara terutama di

tingkat lokal, musyawarah pada tingkat masyarakat sipil tanpa intervensi negara, serta kepentingan semua pihak yang bersama-sama membentuk masyarakat bangsa. Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang terbuka, yang siap berdialog, siap menjelaskan segala sesuatu secara gamblang.

Demokrasi menjunjung kebebasan dan kesetaraan, yang membuka ruang publik untuk pembicaraan secara terbuka bagi setiap warga masyarakat untuk menyatakan kepentingannya bahwa setiap orang memiliki akses yang sama untuk masuk ke ruang publik itu. Untuk menjamin terjadinya demokrasi liberal ataupun demokrasi deliberatif perlu dibangun sikap mengkondisikannya yakni sikap hukum, sikap *reasonable*, sikap toleran dan *overlapping consensus*.

D. Sikap Hukum

Dalam masyarakat dengan budaya politik demokratis segala sesuatu diatur oleh hukum. Pertama hukum harus adil artinya berlaku umum, untuk semua, isi hukum harus masuk akal. Hukum berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu. Tidak ada hak istimewa atau diskriminasi atas dasar apapun, entah kekuasaan, mayoritas agama, suku, ataupun keturunan.

Kedaulatan negara diatur oleh hukum, hukum tidak hanya mengatur individu melainkan juga masyarakat politik, dalam hal ini negara. Dengan kata lain hukum juga mengatur semua tingkah laku negara. Negara harus menjamin hak setiap warga negaranya, oleh karenanya negara bisa dituntut secara hukum kalau negara berlaku tidak adil kepada warganya atau merugikan warganya. Hukum juga harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta hukum harus sesuai dengan martabat manusia.

E. Sikap *Reasonable*

Sikap *reasonable* warga negara dapat ditunjukkan dengan cara warga negara yang mampu menerima perbedaan. Perbedaan adalah realitas faktual yang tidak bisa dilenyapkan dari pandangan mata, fakta yang tidak bisa dianggap semu. Atas dasar itulah dia tidak menghabiskan waktu dan energi untuk menolak pluralisme melainkan belajar untuk hidup dalam pluralisme.

Warga negara *reasonable* adalah warga yang melihat doktrin dan pandangan hidup sendiri ganya sebagai pandangan hidup sendiri ganya sebagai sa;ah satu dari doktrin atau pandangan hidup lainnya. Ada kebesaran hati dalam dirinya untuk melihat adanya kemungkinan pandangan hidup lain yang dibangun di atas landasan yang tidak bisa didiskusikan.

Manusia yang *reasonable* itu mengejar kepentingan sendiri tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain. Manusia *reasonable* memperjuangkan kepentingan berdasarkan prinsip keadilan, tidak berarti hanya menghormati hak orang lain melainkan juga menuntut gaknya dan hak orang lain yang tidak dihormati.

Manusai *reasonable* bersedia menerima prinsip pokok sebagai dasar kerjasama sosial ini mencangkup soal kesetiaan pada perjanjian kesepakatan untuk menjalankannya sesuai kesepakatan. Manusia *reasonable* memiliki keyakinan dan pandangannya sendiri, tetapi sekaligus mampu mempertanyakan dan bahkan melampaui kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok orang yang mampu melihat kepentingan kelompok lain sebagai bagian dari kepentingannya sendiri, menghargai hak-hak pihak lain sebagai bagian dari penghargaan terhadap hak-haknya sendiri.

F. Sikap Toleran dan *Overlapping Consensus*

Dalam masyarakat plural kita menemukan adanya keaneragaman yang tidak dapat dijadikan kesepakatan melainkan hanya bisa diterima sebagaimana adanya. Oleh karenanya dibutuhkan sikap toleran dan *overlapping consensus*.

Toleransi tidak sekedar berarti membiarkan orang menjalankan keyakinannya sendiri, melainkan juga membuka kemungkinan bahwa dalam perbedaan yang tak terjembatani tetap terbuka kemungkinan adanya kerjasama yang menguntungkan komunitas. Maka toleransi perlu dilengkapi dengan sikap *overlapping consensus*.

Sikap *overlapping consensus* yang terpenting adalah tetap adanya keterbukaan terhadap dialog-dialog yang jujur untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang diliberatif. Dialog-dialog tidak untuk saling menyerang melainkan

sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, dan tidak memasuki hal-hal yang sifatnya privat. Kesepakatan hasil dialog harus merupakan *overlapping consensus*, kesepakatan-kesepakatan diterima karena setiap pihak mampu melihat kesesuaiannya dengan ajaran agama atau pandangan moral masing-masing.



MODUL KEEMPAT

HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT

MULTIKULTURAL

Telah dijelaskan bahwa budaya politik yang ideal bagi masyarakat multikultural adalah demokrasi, hal ini dikarenakan demokrasi memberi perhatian kepada setiap manusia, menjamin kebebasan dan hak asasinya. Upaya membangun hak asasi harus menjadi bagian dari membangun masyarakat multikultural, dan sebaliknya masyarakat multikultural mengandaikan adanya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu untuk melaksanakan hak-haknya berhadapan dengan kekuasaan entah negara atau kekuatan mayoritas melainkan juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat dimana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

A. Hak Asasi dan Keaneragaman Manusia

Menjadi manusia dengan sendirinya menuntut pengakuan terhadap hak-hak sebagai manusia, entah hak-hak sendiri berhadapan dengan hak-hak orang lain, atau hak-hak sendiri berhadapan dengan hak-hak bersama. Pengakuan akan hak asasi manusia sebenarnya tidak bisa lepas dari pengakuan akan keberagaman manusia, artinya masyarakat multikultural harus jadi lingkungan yang kondusif bagi pengakuan akan hak asasi manusia. Dalam konteks multikulturalisme berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk masuk dalam budaya tertentu dan ikut serta dibentuk dan membentuk budaya itu.

Dalam pembahasan kali ini, akan diuraikan lebih dalam mengenai mengapa hak ini disebut sebagai asasi, upaya teoritis untuk memberikan landasan yang kuat bagi implementasinya dan menyikapi upaya menegakan hak asasi manusia dalam konteks multikulturalisme.

B. Hak Asasi Manusia dalam Sejarah

Kesadaran akan hak asasi manusia dianggap muncul di Inggris dalam Magna Charta Libertatum tahun 1215 sebagai embrio HAM. Absolutisme raja Inggris dibatasi dan harus bertanggung jawab di muka undang-undang dasar yang dibuat oleh parlemen. Di Prancis ada deklarasi HAM dan Warga Negara tahun 1789, ini merupakan dasar dari *the rule of law* setelah revolusi Prancis ada teori Rousseau tentang social contract dan teori Montesquieu tentang trias politica

Universal Declaration of Human Right (UDHR) PBB Desember yang diterbitkan pada tahun 1948 mengutamakan hak sipil dan hak politik. Pada tahun 1966 muncul konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang dikenal sebagai *international bill of human right* yang mengutamakan hak ekonomi dan budaya.

Hak asasi manusia secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 1. Hak fundamental yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, bebas dari perbudakan, bebas berpikir, berhati nurani dan beragama. 2. Hak sipil dan politik yaitu bebas dari campur tangan negara versus hak ekonomi sosial dan budaya menuntut campur tangan negara, 3. Hak solidaritas dunia ketiga berhadapan dengan tatanan internasional.

Memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial politik dan kultural hak atas pembangunan ekonomi sosial dan hak untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia serta informasi dan kemajuan lain, hak atas perdamaian, lingkungan yang sehat dan natuan kemanusiaan.

C. Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Multikultural

Pemahaman tentang hak asasi akan terus berkembang menuju kesempurnaan, artinya tingkat kesadaran akan hak asasi membutuhkan sebuah proses. Hak asasi manusia bukan merupakan suatu konsep jadi yang paten dan selesai melainkan suatu proses yang terus menerus mengalami pemurnian. Hak asasi manusia pada

hakikatnya ada pada manusia dan karena itu harus ditegakkan di atas dasar dan landasan yang kuat.

1. Hak Asasi Manusia : *Inalienable Rights*

Ada beberapa alasan mengapa hak asasi itu adalah hak yang tidak bisa dicabut atau *inalienable rights*. Pertama HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tetap disandangnya sepanjang dia adalah manusia. Pencabutan hak pada diri manusia berarti merendahkan atau mengeliminasi martabatnya sebagai manusia. Kedua hak ini didapatkan manusia sebagai manusia dan bukan karena ciri-ciri tertentu. Maksudnya perbedaan ciri sebagai wanita atau pria, ras dan suku, kekayaan, kekuasaan, agama, dan lain-lain tidak dapat mendasari perbedaan dalam hak asasi manusia

Ketiga hak itu bersifat supra legal tidak bergantung pada negara atau undang-undang dasar. Hak ini memiliki wewenang lebih tinggi untuk bertindak dibandingkan pemerintah. Hak itu merupakan pedoman umum untuk menilai lembaga serta undang-undang nasional. Keempat hak itu anugerah pencipta atau alam kondrati. Tidak ada manusia lain yang berhak mencabut hak asasi manusia karena hak itu bukan pemberian manusia.

2. Hak Asasi dan Kewajiban Asasi

Selain hak, perlu juga disinggung mengenai kewajiban asasi. Setiap hak memunculkan kewajiban. Hal ini sempat disinggung dalam teori korelasi, bahwa ada korelasi antara hak dan kewajiban. Namun perlu dipahami bahwa pandangan teori korelasi ini perlu dilihat secara kritis.

Pertama kalau dilihat dari segi hak maka ada hak yang tidak menuntut kewajiban misalnya hak sosial, misalnya saja tidak mewajibkan orang lain untuk memberikan saya pendidikan atau pelayanan kesehatan. Kedua ada kewajiban yang tidak mengandaikan hak. Hal ini dilihat dari kewajiban untuk menghormati orang yang sudah meninggal walaupun orang yang meninggal tersebut tidak punya hak lagi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara hak dan kewajiban tidak selalu ada hubungan timbal balik, tetapi hubungan timbal balik itu lebih tampak erat dalam hak asasi dan kewajiban asasi. Tidak cukup hanya menuntut hak asasi tetapi sebaliknya perlu adanya kepedulian terhadap kewajiban asasi.

3. Hak Asasi itu Universal dan Kontekstual

Hak asasi manusia itu universal dalam arti bahwa hak itu dimiliki oleh manusia sebagai manusia. Lepas dari ciri-ciri yang berbeda pada manusia menyangkut jenis kelamin, suku, kaya, miskin, bahasa, dan lain-lain. Hak itu sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Hak asasi juga kontekstual artinya hak asasi muncul atau disadari dalam konteks tertentu berhadapan dengan tantangan tertentu. Kontekstualisasi hak asasi manusia ini harus terus dikembangkan dan diupayakan agar hak-hak dasar manusia universal semakin dapat diimplementasikan dengan lebih memadai di berbagai macam lingkungan budaya yang plural

4. Hak Asasi Bukan Produk Budaya Tertentu

Hak Asasi Manusia tidak bisa ditolak hanya karena ada anggapan bahwa hak asasi itu adalah produk barat. Hak asasi bukan sekedar konsep budaya melainkan juga merupakan bangun normatif yang diterapkan dalam bentuk prinsip-prinsip moral dan politik pada umumnya.

Mereka yang menganggap bahwa hak asasi manusia adalah produk budaya tertentu sebenarnya menolak fakta bahwa tradisi agama-agama besar sudah lebih dahulu berbicara tentang hak asasi manusia sebelum doktrin-doktrin barat tentang hak asasi manusia. Walaupun memiliki doktrin yang berbeda semua agama besar memberi perhatian pada martabat manusia. Masalah keadilan sosial merupakan keprihatinan pokok yang sering merebut perhatian tradisi agama-agama.

Hukum kemanusiaan bertumbuh dari pengalaman eropa dan pada awalnya dikodifikasi oleh orang eropa. Secara alamiah tumbuh diatas moral dan sumber intelektual eropa. Akan tetapi norma perilaku kemanusiaan mungkin menjadi kuar

berakar dalam arena budaya non eropa jika lebih eksplisit dihubungkan dengan sumber inspirasi non eropa. Mungkin secara kontekstual kesadaran itu dayang dari barat tetapi tidak berarti baru dimunculkan oleh orang barat.

5. Hak Asasi Manusia Bukan Produk Pencerahan

Hak asasi manusia bukan hasil rasionalisme zaman pencerahan, zaman dimana akal budi dianggap sebagai penentu segala kebenaran. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan bahwa HAM berasal dari paham otonomi tentang manusia yang tidak dikenal dalam masyarakat timur, apalagi mengatakan bahwa hak asasi itu bertentangan dengan agama.

Hak asasi berasal dari hukum kodrat yang adalah hukum Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri memberikan hukum kodrat pada ciptannya, maka hukum manusia harus sesuai dengan hukum kodrat. Maka hak asasi tidak boleh diganggu gugat oleh manusia, negara, atau organisasi. Hak asasi juga bukan hasil pendasaran filosofis melainkan masalah konkrit yang berhadapan dengan masalah kemanusiaan.

6. Hak Asasi Manusia Melindungi Individu

Hak asasi manusia adalah sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok serta golongan yang lemah berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar dalam masyarakat modern. Hak asasi merupakan bukti solidaritas sosial untuk melindungi sesamanya yang tertindas. Maka hak asasi merupakan perlindungan bagi hak-hak pihak yang lemah.

HAM merupakan tanda kekeluargaan yang nyata, tidak benar kalau dikatakan bahwa hak asasi manusia mempertentangkan individu dan negara. Tidak masuk akal pula kalau negara menolak adanya hak asasi hanya karena tidak sesuai dengan budaya ketimuran.

7. Hak Asasi Tidak Anarkis

Anarki sering kali dianggap sebagai ciri khas perjuangan penegakan hak asasi manusia. Perjuangan ini dianggap menggoyang kemapanan, mendorong tantangan pada tatanan sosial, meniupkan semangat memberontak, dan karenanya harus ditolah demi stabilitas negara. Terhadap keberatan ini harus dikayakan bahwa stabilitas sosial sejati ini hanya dicapai dengan keadilan sosial bukan dengan penindasan politik.



MODUL KELIMA

MEMAHAMI DAN MENYIKAPI PLURALITAS BUDAYA

Konflik keyakinan yang bermuara pada konflik sosial bukan lagi hal baru. Perang antar suku dan konflik antar agama hampir selalu bisa terjadi kapan saja ketika kelompok yang satu mereka tak lagi nyaman berada atau berdampingan dengan kelompok berbeda.

Ada banyak alasan munculnya konflik sosio-kultural, akan tetapi salah satunya dan ini yang paling mendasar adalah ketidakmampuan untuk memahami kebudayaan serta menempatkannya secara tepat dalam kerangka ideal hidup manusia sebagai makhluk moral dan beradap.

A. Budaya Sebagai *Lifeworld*

Manusia selalu berusaha memberi makna pada hidupnya, pada dunia dia berada, dan pada kegiatan-kegiatannya. Makna dari sebuah kegiatan berhubungan dengan hakikat dan tujuan atau arah yang dituju. Terdapat kaitan erat antara makna dan signifikansi. Pentingnya suatu tindakan sangat tergantung pada bagaimana kita memahami hakikat dan tujuannya. Kita bisa bertanya mengapa kegiatan itu penting apa perannya dalam kehidupan manusia, seberapa penting dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain.

Kepercayaan manusia tentang makna dan signifikansi inilah yang menjadi bingkai nilai yang memberi warna pada praktik atau aktivitas. Sebagai sistem keyakinan dan praktik hidup, kebudayaan terungkap dalam berbagai bentuk yang sekaligus mengungkapkan adanya nilai-nilai bersama sebuah komunitas.

Keyakinan dan praktik adalah dua unsur esensi kebudayaan yang tentu sangat erat kaitan satu sama lainnya. Keyakinan berfungsi memberi arah pada praktik sebaliknya praktik merupakan manifestasi keyakinan kendati keduanya berkaitan tidak selalu demikian. Keduanya berkaitan dengan erat satu sama lain, keyakinan dan praktik juga ototnom satu terhadap lainnya. Ada empat perbedaan penting

antara keduanya, yaitu pertama keyakinan atau sistem kepercayaan bersifat umum, bahkan sering kabur dan karenanya membuka ruang interpretasi berbeda. Kedua, kepercayaan sulit dilepaskan dan dipaksakan. Ketiga kepercayaan terutama masuk dalam domain pemikiran sedangkan praktik masuk dalam wilayah perilaku. Terakhir keempat, keterikatan pada kepercayaan lebih merupakan masalah konsistensi intelektual.

B. Kebudayaan dan Agama

Agama juga menekankan pada makna dan signifikansi sebuah tindakan. Sulit dipahami kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan sama sekali dari pengaruh agama. Masalah pada manusia modern adalah krisis moralitas, manusia modern gagal memahami alasan religius yang mendasari nilai-nilai tersebut, manusia modern tidak mampu membela ideal-ideal ini secara memadai dengan menggunakan alasan-alasan yang seluruhnya sekuler.

Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya kebudayaan dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan atau bagaimana ritual harus dipraktikkan.

Adanya pengaruh kebudayaan ini maka perubahan dalam cara memahami agama dan praktik-praktik ritualnya pun bisa saja terjadi yang gilirannya semakin menciptakan keberagaman sistem nilai dan praktik kehidupan dalam sebuah masyarakat. Tidak pernah ada ukuran yang sangat jelas untuk menjelaskan sikap budaya anggota komunitas budaya tertentu, yang pasti keberagaman sikap terhadap nilai-nilai budaya justru mendorong kontestasi nilai-nilai yang pada gilirannya menciptakan perubahan. Budaya tidak pernah statis meskipun tidak semua aspek dari kebudayaan harus berubah pada saat yang sama.

C. Loyalitas pada Kebudayaan dan Diversivitas Budaya

1. Kewajiban terhadap kebudayaan dan komunitas budaya

Komunitas kultural selalu punya dua dimensi: kultural dan komunal. Dimensi kultural berkaitan dengan isi atau nilai-nilai budaya, sedangkan dimensi komunal

berkaitan dengan kelompok orang yang secara bersama-sama memiliki kebudayaan tertentu itu. Kedua dimensi ini berkaitan satu sama lain akan tetapi dapat pula dipisahkan.

Jika berbicara mengenai kesetiaan pada kebudayaan, yang dimaksudkan adalah kesetiaan yang berkaitan dengan satu atau kedua dimensi itu. Kita harus setia pada kebudayaan kita karena kebudayaan memiliki kontribusi penting terhadap hidup kita dan barangkali karena kebudayaan punya nilai universal. Kebudayaan apapun dan darimana pun selalu memuat nilai-nilai yang pasti berharga bagi manusia untuk menata dan menjalani hidupnya secara bermakna.

Beberapa hal berikut dapat disebut sebagai kewajiban anggota komunitas budaya yang sekaligus menjadi tanda loyalitas terhadap kebudayaan, pertama menjadi kewajiban kita untuk memelihara ingatan kita akan mereka yang sudah secara kreatif menciptakan kebudayaan. Kedua, sadar akan nilainya bagi hidup kita, kita juga memiliki kewajiban untuk memelihara kelangsungan kebudayaan dengan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Ketiga kewajiban terhadap kebudayaan yang terwujud dalam bentuk usaha untuk mengeksplorasi lebih jauh, memperkaya, memperdalam, serta menyingkirkan berbagai unsur yang bersifat merusak.

Apa yang disebut kewajiban terhadap kebudayaan berkaitan dengan loyalitas terhadap nilai-nilai, sistem kepercayaan, serta praktik-praktik budaya. Sedangkan loyalitas kepada komunitas budaya tidak terarah kepada nilai-nilai seperti itu, melainkan terhadap komunitas itu sendiri. Menjadi kewajiban anggota komunitas budaya untuk membela komunitasnya melawan pemahaman yang salah tentang nilai-nilai budaya. Kewajiban terhadap komunitas budaya juga menjadi nyata lewat usaha memerang ketidakadilan dan penindasan terhadap komunitas budaya.

2. Manfaat Pluralitas Budaya Argumen Pendukung Keberagaman

Loyalitas pada kebudayaan serta cinta pada komunitas budaya merupakan kewajiban setiap anggota komunitas budaya, meskipun begitu kewajiban tidak boleh membuat kita menutup mata atau bahkan menyangkal adanya keragaman

budaya. Ada beberapa alasan mengapa kita harus tetap terbuka mengakui keragaman budaya, pertama adanya keragaman budaya memberi peluang yang lebih terbuka bagi individu untuk memilih kebudayaan. Keragaman budaya justru memperbesar ruang kebebasan individu untuk memilih. Kedua ada anggapan bahwa manusia adalah makhluk budaya dan karenanya setiap orang punya hak atas kebudayaannya. Dengan demikian keragaman budaya adalah sesuatu yang tak terhindarkan dan merupakan hasil legitim dari pelaksanaan hak atas kebudayaan.

Ketiga, argumen yang lebih romantis sifatnya diajukan oleh kaum liberal seperti Herder dan Schiller, yang menyatakan bahwa keragaman budaya menciptakan sebuah dunia yang kaya, bervariasi dan secara estetis menyenangkan dan bergairah. Argumen ini tampak menyakinkan namun secara moral tidak kuat. Keempat tokoh-tokoh seperti Mill dan Humboldt mengaitkan keberagaman dengan individualitas dan proses atau kemajuan. Keberagaman penting untuk mendorong kompetisi yang sehat antar berbagai cara berpikir, gagasan, dan cara hidup yang sekaligus mencegah dominasi yang satu terhadap yang lain dengan itu juga mendorong munculnya kebenaran baru.

3. Beberapa Manfaat Utama Pluralitas Budaya

Pertama adalah saling melengkapi, sikap terhadap budaya sangat tergantung pada kemampuan manusia untuk menilai atau mengevaluasi kebudayaannya. Manusia memiliki keterbatasan, namun keterbatasan inilah yang mendorong setiap kebudayaan untuk menekankan nilai tertentu dengan mengabaikan atau tidak memberikan perhatian memadai pada nilai-nilai yang lain.

Tidak ada satupun kebudayaan yang memuat semua hal yang dipandang bernilai dalam kehidupan manusia dan mengembangkan seluruh kemampuan manusia. Karena itulah kebudayaan yang berbeda-beda dapat saling mengoreksi dan saling melengkapi, saling memperluas horizon berpikir dan saling mengingatkan akan kemungkinan bentuk-bentuk baru kesempurnaan hidup manusia.

Kebudayaan juga merupakan kondisi atau prasyarat penting untuk kebebasan manusia. Manusia akan terpenjara dan cenderung mengabsolutkan kebudayaannya sendiri kalau tidak ada peluang baginya untuk mengambil jarak dan melangkah keluar dari kebudayaannya. Ketika cara pandang dan cara berpikir seseorang dibatasi hanya oleh kebudayaannya sendiri ia akan cenderung melihat kebudayaannya sebagai satu-satunya cara untuk memahami dan mengorganisasi kehidupannya. Sikap mengabsolutkan cara pandang dan cara hidup tertentu hanya dapat direlativikasi kalau ada akses ke dalam kebudayaan lain.

Hadirnya kebudayaan lain membantu individu untuk memenadang kebudayaannya sendiri dari posisi luar, lalu mencoba memilah kekuatan dan kelemahannya dan dengan cara ini ia mengukuhkan kesadaran dirinya sendiri. Keragaman kebudayaan memiliki nilai objektif dalam arti keberagaman budaya penting untuk menciptakan prakondisi-prakondisi untuk kebebasan manusia, seperti pengetahuan akan diri sendiri, transendensi diri serta kritik diri.

Kebiasaan hidup dalam keberagaman budaya mendorong kita untuk mencari nilai-nilai berbeda di dalam kebudayaan kita sendiri dan karenanya juga kita bisa lebih terbuka untuk menghargai dan memperlakukan keberagaman dengan adil. Kebudayaan yang berbeda dapat saling mengingatkan dan saling belajar. Kebudayaan kita sendiri sesungguhnya merupakan produk dari pengaruh yang beraneka ragam. Kebudayaan kita terdiri dari berbagai corak berpikir dan senantiasa terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Keberagaman budaya mendorong dialog internal dalam kebudayaan tertentu, ia menciptakan ruang bagi pemikiran kritis dan independen

Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila sebuah komunitas kebudayaan menghargai nilai dan kemuliaan manusia, melindungi kepentingan dasar manusia berkaitan dengan sumber daya yang terbatas, tidak bersifat mengancam bagi kelompok luar, serta memberikan anggotanya rasa nyaman dalam relasi satu sama lain dan karenanya memberikan kondisi-kondisi dasar untuk hidup yang baik, maka komunitas kebudayaan seperti ini dan hanya komunitas seperti ini yang patut dihargai.

4. Dialog antar budaya

Kebudayaan bersifat pluralistik, karena itu juga beragam sistem nilai atau sistem kepercayaan serta praktik-praktik budaya. Tidak jarang terjadi kondlik antara unsur-unsur budaya ini. Betapaun beragamannya setiap mayarakat menuntun bahwa untuk bertahan atau berfungsi dengan baik dibutuhkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Diperlukan nilai-nilai sebagai pengikat atau perekat dalam perbedaan. Nilai-nilai seperti ini tentu saja bersifat umum dan hanya dipandang relevan dalam konteks publik.

Kehidupan umum dihidupi dalam tiga level dan nilai bersama atau publik ini terungkap dalam tiga tingkatan. Pertama nilai ini dirumuskan di dalam konstitusi dimana ditetapkan rancangan legal dan moral kebijakan yang meliputi dimana ditetapkan rancangan legal dan moral kebijakan yang meliputi hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua nilai ini lebih lanjut dirumuskan secara lebih konkrit di dalam hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari warga negara. Ketiga nilai juga terungkap dalam bentuk norma-norma yang mengatur relasi sipil antar anggota masyarakat.

Dengan demikian apa yang disebut nilai-nilai konstitusional, nilai hukum dan sipil sesungguhnya merepresentasikan budaya publik, memberi bentuk serta substansi pada budaya publik yang sekaligus juga merefleksikan apa yang disebut hidup baik oleh masyarakat. Nilai ini tidak statis, melainkan dinamis selalu bisa berubah sebagai respon terhadap perubahan situasi dan tantangan. Ini berarti nilai-nilai publik tidak imun terhadap kritik, selalu terbuka untuk diuji dinilai dan diterima secara pragmatis atau sementara oleh anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ujan, Andre Ata, dkk. 2009. *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta : Indeks
- Hayat, Edi dan Surur, Miftahus. 2005. *Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi*. Depok : Desantara
- Budiman, Hikmat. 2005. *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta : The Interseksi Fondation
- Mio, Jeffery Scott dan Awakuni, Gene I. 2000. *Resistance to Multiculturalism : Issues and Interventions*. Philadelphia PA : Brunner/Mazel – Taylor & Francis Group
- Kelly, Paul. 2002. *Multiculturalism Reconsidered*. Oxford : Polity Press
- Liew, Ten Chin. 2004. *Multiculturalism and The Value of Diversity*. Singapore : Marshall Cavendish Academic
- Jurnal Perempuan No 47. 2006. *Edisi Mengapa Perempuan Menolak RUU APP?*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Right*. New York : Oxford University Press Inc.

JEMBER